

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Entitas sektor publik adalah sebuah entitas dalam ranah ekonomi yang mempunyai ciri khas khusus. Disebut sebagai entitas dikarenakan mempunyai sumber daya ekonomi yang signifikan dan terlibat dalam transaksi ekonomi serta keuangan seperti entitas ekonomi lainnya. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam tujuan kegiatan. Perusahaan komersial, sebagai contohnya, memiliki fokus utama pada pencapaian laba. Sebaliknya, organisasi pada sektor publik, sumber daya ekonomi diolah dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>2</sup> Akuntansi sektor publik kerap disebut akuntansi dana masyarakat, di mana analisis dan teknik akuntansi yang diterapkan bertujuan untuk mengelola sumber daya ekonomi dari masyarakat.<sup>3</sup> Pada saat ini, praktik akuntansi yang diterapkan pada organisasi sektor publik mendapatkan perhatian lebih besar, hal tersebut karena adanya perkembangan yang pesat di masa sekarang. Oleh karena itu, organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan yang dikelola.<sup>4</sup> Hal tersebut penting dilakukan karena masyarakat berhak untuk mengetahui informasi terkait

---

<sup>2</sup> Sarwenda Biduri, *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>4</sup> Dona dan Lestari, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm.136

posisi keuangan, mengingat sumber daya ekonomi yang diolah untuk memberikan layanan publik bersumber dari masyarakat.

Salah satu entitas dalam sektor publik adalah lembaga sektor pemerintah. Entitas tersebut melakukan berbagai program operasional. Pembuatan anggaran menjadi salah satu komponen utama dalam pelaksanaan suatu program, dimana fungsinya sebagai alat untuk mencapai target dalam periode tertentu. Namun, pengelolaan anggaran di lingkungan sektor publik merupakan proses yang rumit karena anggaran yang telah dirancang harus dipublikasikan agar bisa dinilai dan ditingkatkan di masa mendatang. Adanya transparansi memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbaikan pada administrasi publik, termasuk dalam sistem penganggaran.<sup>5</sup>

Di tingkat pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai kerangka acuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kecocokan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD serta diresmikan melalui peraturan daerah. APBD mencakup rancangan pendapatan dan belanja untuk tahun mendatang. Fungsi dari APBD tidak hanya menjadi rencana keuangan tahunan, tetapi

---

<sup>5</sup> Suroso, Tinangon, dan Wokas, "Analisis Realisasi Belanja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.5 , No. 2, 2022, hlm. 1011—1018

juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya tujuan bernegara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui APBD dengan mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan meminimalkan pemborosan sumber daya.<sup>6</sup>

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar hukum untuk implementasi otonomi daerah. Atas berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola keuangan daerahnya tanpa melanggar peraturan dan dasar negara Indonesia.<sup>7</sup>

Sistem desentralisasi sangat tepat digunakan di Indonesia mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia. Sistem desentralisasi mempermudah pemerataan pembangunan dengan memun

gkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada kebutuhan lokal dan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri. Pemerintah daerah perlu mempunyai kemandirian keuangan yang besar agar dalam menjalankan kegiatan pemerintahan berjalan dengan lancar. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak mengolah potensi daerah dan menggunakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, termasuk

---

<sup>6</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2019), hlm. 64–65

<sup>7</sup> Dona dan Lestari, "Analisis Laporan.....", hlm. 136

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah.

Pemerintahan yang baik harus mengutamakan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.<sup>8</sup> Dalam konteks pemerintahan, jenis akuntansi yang digunakan adalah akuntansi pemerintah. Menurut Dasmaran, dkk dalam Hantono, dkk dengan melalui otonomi daerah, sebagian dari kebijakan yang semula ditetapkan oleh pemerintah pusat diubah menjadi kebijakan daerah, seperti kebijakan pengelolaan keuangan. Dalam kerangka sistem akuntansi pemerintahan, ada penetapan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertugas menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan bertujuan agar terjadi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, berorientasi pada pencapaian tujuan, proporsionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.<sup>9</sup>

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah *output* yang dihasilkan dalam akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan tersebut memiliki beberapa komponen, salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini memberikan informasi mengenai kondisi anggaran yang terealisasi berupa pendapatan maupun belanja kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh entitas pemerintah yang disusun menurut standar Laporan Realisasi Anggaran, sehingga

---

<sup>8</sup> Widaningrum dan Fahriani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung", *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 6 No 2, 2023, hlm. 2426

<sup>9</sup> Hantono, dkk., *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 179

menghasilkan gambaran yang terstruktur dan jelas tentang bagaimana anggaran direalisasikan dalam periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran akan memperlihatkan bagaimana sumber daya ekonomi diolah. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja keuangan menjadi penting. Kinerja sendiri adalah suatu capaian usaha dalam melakukan aktivitas keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah, dimana sesuai peraturan yang berlaku.<sup>10</sup> Untuk mengukur kinerja keuangan, dapat menggunakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik (*value for money*) berupa ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.<sup>11</sup> Elemen tersebut terbagi dalam 2 indikator Indikator kualitas pelayanan dan alokasi biaya.<sup>12</sup>

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai kota marmer. Alasan dijuluki "kota marmer" karena karena menjadi salah satu daerah utama di Indonesia yang memproduksi marmer dalam jumlah besar. Sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung berasal dari sektor pajak daerah, dimana menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi daerah Tulungagung sangat besar, mencakup berbagai sektor seperti industri, pariwisata, kuliner, dan lainnya, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengeksplorasi potensi daerah dengan sebaik mungkin dan meningkatkan pemungutan pajak. Tujuannya adalah agar realisasi

---

<sup>10</sup> Amanda, dkk., "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung ", *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 53

<sup>11</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor.....*hlm. 18

<sup>12</sup> Mahsun, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPF, 2015), hlm. 181

penerimaan daerah dapat terus meningkat dan melebihi target anggaran pendapatan yang telah ditentukan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga pemerintah daerah yang membantu bupati di bidang keuangan sebagai bagian dari tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. BAPENDA berperan sebagai pihak yang mengelola pajak daerah dan koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pajak daerah yang dikelola oleh BAPENDA meliputi Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, juga Pajak Mineral Bukan Logam.<sup>13</sup> Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>13</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dalam <http://bapenda.tulungagung.go.id/>, diakses 10 November 2023

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	91.844.968.213,00	95.960.942.649,28
2019	96.561.150.000,00	102.819.578.147,00
2020	82.024.600.000,00	93.524.688.169,00
2021	98.020.600.000,00	112.209.609.959,00
2022	120.467.000.000,00	133.752.102.811,00
Tahun	Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	17.141.644.044,10	15.459.279.353,18
2019	18.349.543.267,95	14.782.283.571,33
2020	16.714.265.820,00	14.617.441.117,24
2021	19.248.048.810,00	17.506.152.369,29
2022	23.475.710.812,00	21.260.691.420,95

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa setiap tahunnya pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung melebihi target yang dianggarkan, sementara realisasi belanja daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya variabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran belanja yang lebih besar dari realisasi bisa disebabkan oleh faktor eksternal, seperti ketidakekonomisan dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional, yang berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak tepat. Faktor lainnya mungkin termasuk kenaikan harga yang tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi penggunaan anggaran belanja.

Dilihat dari anggaran belanja yang lebih besar dari realisasi, menandakan bahwa kemungkinan BAPENDA Kabupaten Tulungagung tidak menjalankan penyerapan anggaran sesuai perencanaan sebelumnya, hal tersebut penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya bahwa program-program yang terencana mungkin sudah berjalan baik sehingga belanja yang direalisasikan lebih kecil dari anggarannya. Di sisi lain, hal tersebut juga bisa terjadi karena beberapa program tidak terealisasi sepenuhnya, yang mengakibatkan kinerja organisasi tidak optimal.

Dalam perspektif Islam, pentingnya pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dari ayat Al-Quran seperti yang termuat dalam Surah Al-Ahqaf Ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

Artinya : *"Setiap orang mendapatkan tingkatan sesuai dengan perbuatannya dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi."*<sup>14</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia baik maupun buruk akan mendapatkan balasan. Jika seseorang atau suatu instansi menjalankan pekerjaan secara baik dan memperlihatkan kinerja yang baik pula, mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan kebaikan tersebut. Hal ini akan memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Dampak dari

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag.....Al-Ahqaf (46:19)*



peningkatan ini akan meningkatkan kondisi ekonomi daerah sehingga daerah mempunyai kemampuan lebih untuk menyelenggarakan pemerintahan dan lancarnya pembangunan di wilayahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dapat diukur dari kemampuannya dalam mengelola keuangan secara efektif. Pengukuran kinerja keuangan penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan sumber daya keuangan telah efisien, ekonomis, dan efektif. Kinerja keuangan yang baik harus dicapai oleh lembaga pemerintah agar perekonomian daerahnya bisa dikatakan dalam kondisi baik. Secara luas, pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam mengelola keuangan pemerintah daerah agar lebih baik di masa depan.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Dona dan Lestari, dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. Simpulan hasil penelitian adalah rata-rata tingkat ekonomi berada pada kriteria yang cukup ekonomis, untuk tingkat efisiensi berada dalam kriteria yang efisien. Kemudian untuk tingkat efektivitas rata-rata masuk dalam kriteria sangat efektif.<sup>15</sup> Penelitian terdahulu juga sudah dilakukan oleh Novita Ramdha Arfah, Hariatih, dan Fitri yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)”. Simpulan hasil penelitian adalah Penelitian Penelitian Novita Ramdha Arfah, Hariatih, dan Fitri yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Badan

---

<sup>15</sup> Dona dan Lestari, “Analisis Laporan....”, hlm. 135

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)”. Simpulan hasil penelitian adalah dari rasio efektivitas menunjukkan cukup efektif, kemudian rasio kemandirian keuangan dalam kriteria tinggi dalam pola hubungan bersifat delegatif artinya kemampuan keuangan tinggi dibandingkan pendapatan dari dana hibah dan pendapatan dari pemerintah pusat, dan rasio pertumbuhan masih dalam kategori rendah sekali <sup>16</sup>

Melihat berbagai temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi hasil antara satu penelitian dengan yang lain dalam menganalisis kinerja keuangan suatu organisasi dengan menggunakan berbagai rasio. Oleh sebab itu, harapannya dengan dilakukannya penelitian ini akan menghasilkan temuan yang tepat, yaitu sesuai dengan di kondisi di lapangan. Sementara pembeda pada penelitian ini terletak pada lembaga pemerintah yang dianalisis yaitu BAPENDA Tulungagung yang sebelumnya belum pernah dijadikan tempat penelitian dengan judul terkait. Peneliti tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), tujuannya guna mengetahui kinerja keuangan lembaga pemerintahan tersebut dengan menganalisisnya menggunakan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Laporan Realisasi Anggaran dalam Menilai**

---

<sup>16</sup> Arfah, Hariatih dan Fitri, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen (MANUVER), Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 251

## **Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tidak sesuai rencana karena alokasi anggaran belanja melebihi realisasi yang terjadi.
2. Perlunya penggunaan serendah-rendahnya sumber daya dan dana dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai hasil kerja tertentu.
3. Banyak sekali potensi daerah yang belum dioptimalkan dan belum dimanfaatkan dengan baik padahal bisa meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ekonomi Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana tingkat efektivitas Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan tingkat ekonomi Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan tingkat efisiensi Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan tingkat efektivitas Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini, secara teoritis berguna menambah ilmu pengetahuan pada mata kuliah akuntansi sektor publik yaitu terkait bagaimana menilai kinerja keuangan suatu organisasi pemerintahan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi dalam mencari solusi terkait bagaimana kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya. Salah satu keuntungan yang didapatkan institusi adalah dapat menjadi salah satu alternatif agar pengelolaan keuangan daerah kedepannya lebih ekonomis, efektif, dan efisiensi.

### b. Bagi Akademisi

Menambah wawasan berkaitan dengan kinerja keuangan organisasi sektor publik. Ruang lingkup topik tersebut dapat menjadi salah satu referensi tambahan materi perkuliahan, khususnya pada konsentrasi akuntansi sektor publik. Kemudian bisa menjadi tambahan referensi belajar khususnya bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung dan untuk mahasiswa dari kampus lain pada umumnya. Selanjutnya penelitian ini juga dapat menjadi tambahan koleksi literatur di UIN SATU Tulungagung.

### c. Bagi Penulis

Menambah pengalaman peneliti dan menjadi sarana belajar dalam memperdalam ilmu tentang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengukuran kinerja keuangan pada organisasi sektor publik.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini adalah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti akan menganalisis kinerja keuangan dari tahun 2018 hingga 2022 menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang dianalisis dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penilaian kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung hanya berfokus pada menganalisis data laporan realisasi anggaran untuk tahun 2018-2022. Analisis LRA berfokus menggunakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Alasan adanya keterbatasan penelitian adalah adanya keterbatasan tenaga, waktu penelitian, dan data yang tersedia.

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Ekonomi

Menurut Mardiasmo, ekonomi merupakan interaksi antara pasar dan masukan. Arti dari pernyataan tersebut adalah ekonomi menggambarkan tindakan membeli barang atau jasa pada kualitas yang ditentukan dengan harga terbaik yang memungkinkan. Definisi ekonomi sering disebut sebagai kehematan yang melibatkan manajemen

yang cermat dan bijaksana serta menghindari perilaku boros. Suatu kegiatan operasional dianggap ekonomis jika mampu mengurangi/ bahkan menghilangkan pengeluaran yang tidak butuh.<sup>17</sup>

b. Efisiensi

Menurut Mardiasmo, efisiensi erat kaitannya dengan produktivitas. Untuk mengukur efisiensi, kita membandingkan masukan yang digunakan dengan keluaran yang dihasilkan. Suatu kegiatan operasional dianggap efisien jika dapat mencapai hasil tertentu atau menghasilkan produk dengan pemakaian sumber daya dan dana sehemat/ seminimal mungkin. Hubungan antara sumber daya yang digunakan oleh suatu entitas (seperti: staf & biaya administrasi) dengan hasil dari *output* merupakan cerminan dari indikator efisiensi.<sup>18</sup>

c. Efektivitas

Menurut Mardiasmo, pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan target kebijakan/ pencapaian tujuan. Efektivitas mengukur sejauh mana *output* mencapai tujuan yang hendak dicapai. Suatu kegiatan operasional akan dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas mencerminkan seberapa besar dampak dan hasil dari program dalam pencapaian tujuan tersebut. Semakin besar peran *output* dalam

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 165

<sup>18</sup> *Ibid.*,

mencapai tujuan yang ditetapkan, semakin efektif pula proses kerja suatu unit entitas/ organisasi.<sup>19</sup>

#### d. Kinerja keuangan

Menurut Francis Hutabarat, definisi kinerja keuangan mencakup analisis dalam menilai seberapa jauh perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang tepat. Kinerja keuangan juga mencakup hasil penilaian pada pekerjaan yang sudah diselesaikan, dengan membandingkannya dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup>

## 2. Definisi Operasional

Penelitian dengan judul “Analisis Laporsn Realisasi Anggaran dalam Menilai Kinerja Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung” adalah untuk mengetahui seberapa ekonomis, efektif, dan efisien kinerja keuangan dari BAPENDA Tulungagung. Hasil analisis dari penelitian ini diperoleh dengan cara menganalisis Laporan Realisasi Anggaran yang dimiliki BAPENDA Tulungagung dengan menggunakan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui struktur pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Pembahasan pada penelitian ini, peneliti

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor.....*, hlm. 166

<sup>20</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Mulia Visitama, 2020), hlm. 2—3



membagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Agar lebih jelas, berikut adalah perinciannya:

### 1. **Bagian Awal**

Pada bagian awal meliputi: sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, gambar, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

### 2. **Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari enam bab pembahasan, diantaranya:

**BAB I**   Pendahuluan: berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**   Landasan Teori: berisi pemaparan teori yang mendukung penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

**BAB III**   Metode Penelitian: berisi tentang uraian pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, *sampling* dan sampel penelitian, sumber data, skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

**BAB IV**   Hasil penelitian: berisi tentang uraian hasil pengolahan data

yang disajikan dalam bentuk deskripsi data dan temuan penelitian.

**BAB V** Pembahasan: berisi uraian hasil permasalahan penelitian atau tujuan penelitian yang telah dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan. Menjelaskan implikasi dari hasil penelitian termasuk dalam keterbatasan temuan penelitian.

**BAB VI** Penutup: isi pada bagian ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang membuktikan tujuan penelitian, implikasi penelitian, dan saran berdasarkan hasil penelitian & pertimbangan yang relevan dengan penelitian.

### 3. **Bagian Akhir**

Pada bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.